

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangun manusia adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesejahteraan. Salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan adalah melalui pembangunan ekonomi, yang melibatkan pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Konstitusi Indonesia UUD 1945 menegaskan hal ini dengan menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” (Rahayu, 2018). Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kehidupan yang layak, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hal tersebut terwujud.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam *Human Development Report*, pembangunan manusia adalah suatu proses meningkatkan pilihan yang lebih banyak bagi manusia untuk hidup (*enlarging the people choices*) atau proses peningkatan kemampuan manusia (BPS Kebumen, 2022). Konsep ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih dan mengejar kehidupan yang lebih baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi juga melibatkan peningkatan

kemampuan individu untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan yang menghambat kemajuan mereka (BPS Kebumen, 2020).

Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam pembangunan manusia. Kemiskinan dapat menjadi penghalang utama bagi individu untuk mengakses peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Maulana et al., 2022). Oleh karena itu, mengurangi tingkat kemiskinan menjadi prioritas dalam upaya pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menciptakan sumber daya dan kesempatan baru bagi masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pulau Jawa, terkenal dengan potensi proyek energi, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, Provinsi Jawa Tengah juga masih dihadapkan pada persoalan terutama dalam hal kemiskinan (BPK RI, 2022). Pada tahun 2023 kemarin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dengan jumlah penduduk miskin 3.791.500 jiwa, jika dibandingkan dengan persentase provinsi lain, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin di pulau Jawa, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS Jawa Tengah, 2024). Terkait data kemiskinan di provinsi Jawa tengah juga mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada data di bawah ini yang diambil dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 13**Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2019	3.743,23	10,80
2020	3.980,90	11,41
2021	4.109,75	11,79
2022	3.831,44	10,93
2023	3.791,50	10,77

Sumber : (BPS Jawa Tengah, 2024)

Dilihat dari tabel di atas, menunjukan bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah telah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengurangi angka kemiskinan selama periode tersebut dengan lebih banyak tahun mengalami penurunan daripada kenaikan. Ini menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Tengah (BPS Provinsi Tengah, 2024).

Kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya pendapatan, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata juga menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi di daerah ini (A. M. Ginting & Rasbin, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang diambil berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dan peningkatan pertahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	5,36
2020	-2,65
2021	3,33
2022	5,31
2023	4,98

Sumber : (BPS Provinsi Tengah, 2024)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tidak stabil, hal ini dikarenakan naik turunnya persentase pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwasannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah cenderung tidak stabil karena fluktuasi yang signifikan dalam persentase pertumbuhannya setiap tahunnya. Meskipun terdapat beberapa tahun dengan peningkatan, namun tetap terdapat tahun-tahun dengan penurunan yang cukup drastis, seperti pada tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (BPS Provinsi Tengah, 2024).

Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. IPM mencakup indikator-indikator seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita, yang semuanya terkait erat dengan kondisi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dapat

menghambat investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas layanan-layanan penting bagi pembangunan manusia (Masdi et al., 2023). Oleh karena itu, fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dapat mempengaruhi perbaikan atau penurunan IPM di daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia di suatu wilayah (Sholekhah, 2018). Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, IPM menjadi parameter penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan sosial dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Masdi et al., 2023). Angka IPM yang disajikan secara periodik setiap tahun bertujuan untuk mengetahui capaian pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah, baik dari sisi capaian IPM secara umum maupun dimensi-dimensi penyusunnya.

Tabel 15**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2023**

Tahun	Jumlah (%)
2019	71,73
2020	71,87
2021	72,16
2022	72,79
2023	73,39

Sumber : (BPS Provinsi Tengah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas angka indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,61%. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan 0,14%. Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,29%. Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,63%. IPM Provinsi Jawa tengah tahun 2023 telah mencapai 73,39%. Dengan capaian IPM tersebut, Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi status pembangunan manusia kategori ‘tinggi’. Walau mengalami kenaikan yang cukup baik terkait Indeks Pembangunan Manusia tetap saja kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Dalam konteks tentang pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama menjadi relevan. Al-Quran, sebagai sumber utama

bagi umat Islam, memberikan panduan tentang keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang seimbang (Syarofi, 2022). Seperti yang termuat di dalam al-qur'an surah Al-Hasyr (59:7):

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan (ingatlah) apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (Madinah); tidak sekali-kali (harta itu) menjadi hak orang-orang kaya di antara mereka. Maka apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya itu (termasuk) adalah untuk orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, dan anak-anak (yang terlantar), supaya jangan harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Dan apa yang diberikan Rasul itu kepadamu, maka terimalah; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya (Departemen Agama RI, 2007)."

Ayat di atas menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi harus adil dan memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin, lemah, dan terlantar. Hal ini penting dalam pembangunan manusia karena keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan merupakan faktor penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ayat tersebut menegaskan perlunya distribusi kekayaan yang adil, di mana harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya, tetapi juga mencakup orang-orang miskin, lemah, dan terlantar. Distribusi yang adil ini penting dalam konteks pembangunan manusia karena memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi (Syarofi, 2022).

Pertumbuhan ekonomi terhubung erat dengan peningkatan volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Semakin besar produksi barang dan jasa, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, dan hal ini juga berpotensi meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan standar hidup yang diukur melalui output riil per individu (Ridwan. & Nawir, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang merata yang diiringi oleh pertumbuhan pendapatan akan menciptakan kondisi di mana disparitas ekonomi dapat dikurangi, menyebabkan peningkatan kesetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dengan demikian hal tersebut dapat mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan indeks manusia. Hal ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Nugraeni, 2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Menurut penelitian Mononimbar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jika dilihat secara terpisah (Mononimbar et al., 2022). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan et al., 2021) menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian ini fokusnya terletak pada variabel pertumbuhan ekonomi sebagai elemen kunci untuk menilai dampaknya terhadap indeks pembangunan manusia.

Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan manusia, karena masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, yang merupakan indikator penting dari pembangunan manusia. Ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dapat mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kemiskinan menjadi masalah yang kemudian akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga masyarakat yang miskin akan terpinggirkan dari kesejahteraan (K. S. Dewi et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heppy Syofya dengan judul penelitian *Effect of Poverty and Economic Growth on Indonesia Human Development Index* menyatakan hasil penelitiannya bahwa baik kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi akan memberikan pengaruh dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia (Heppi, 2018). Fokus pada isu-isu kemiskinan dalam proses pembangunan dapat menghasilkan hasil yang lebih berkualitas, di mana pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dapat terjadi secara bersamaan. Dalam paradigma pembangunan manusia, pendapatan dianggap sebagai alat untuk mengakses sumber daya, yang memungkinkan individu untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak berdasarkan pilihan yang mereka buat secara bebas.

Dari ketiga data yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya ketiga faktor tersebut saling terkait dalam konteks pembangunan suatu daerah. Data

kemiskinan menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kesehatan ekonomi daerah, sementara indeks pembangunan manusia mengukur kesejahteraan dan kemajuan secara holistik. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (Yektiningsih, 2018). Standar hidup layak adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan. BPS menggunakan berbagai metode untuk menentukan standar hidup layak, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan akses layanan kesehatan (BPS Kebumen, 2020). Standar hidup layak ini membantu dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah. Hal ini juga sesuai dengan teori lingkaran keadilan yang dimiliki Ibnu Khadun, Ibn Khaldun mengemukakan konsep bahwa keadilan sosial dan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat yang stabil (Fitriani, 2019). Dalam konteks ini, standar hidup layak dianggap sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, dengan memberikan akses yang setara terhadap kebutuhan dasar bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, melalui penerapan standar hidup layak, diharapkan dapat membentuk lingkaran keadilan yang mendorong kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui analisis data ini, penelitian dapat mengeksplorasi hubungan kompleks antara ketiga faktor tersebut dan menggali perspektif Ibn Khaldun dalam konteks pembangunan daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari permasalahan di atas maka diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, di Provinsi Jawa Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Ibnu Khaldun) tahun 2019-2023”**.

B. Pembatasan Masalah

Untuk memperkuat fokus dan kedalaman penelitian ini, penulis memilih untuk mempersempit ruang lingkupnya. Penelitian ini terutama terfokus pada analisis pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), dengan penekanan khusus pada peran sumber daya manusia serta upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM. Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia ditinjau dari ekonomi islam perspektif Ibnu Khaldun. Dengan membatasi fokus pada aspek-aspek ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia di tingkat kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 dalam perspektif Ekonomi Islam Ibnu Khaldun?

D. Penegasan Istilah

1. Pengaruh

Pengaruh adalah hasil dari interaksi dengan entitas baik berupa objek atau individu yang memiliki potensi untuk membentuk karakter, perilaku, atau keyakinan seseorang (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Dalam hal ini pengaruh merujuk pada hubungan atau dampak yang dimiliki oleh faktor-faktor tertentu terhadap variabel yang diteliti, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang menciptakan ketidakadilan sosial akibat disparitas yang signifikan dalam distribusi kekayaan, sumber daya, dan akses terhadap kesempatan (Girsang, 2015). Hal ini menyoroti kondisi di mana sebagian besar masyarakat mengalami keterbatasan ekonomi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan materi, tetapi juga memperburuk ketimpangan struktural dalam masyarakat. Akibatnya, kemiskinan bukan hanya masalah individual, tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan perhatian serius dan solusi yang holistik.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara (N. Dewi, 2017). Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, termasuk melalui penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan IPM dalam perspektif ekonomi syariah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keberdayaan, dan keberkahan dalam distribusi ekonomi.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Harahap, 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di suatu wilayah atau negara, yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

5. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi yang terletak di 5040' - 8030' Lintang Selatan dan 108030' - 111030' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan (Edatabes Bapeda Jateng, 2024).

6. Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Khaldun

Ekonomi Islam dalam perspektif Ibnu Khaldun adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, solidaritas sosial (*asabiyyah*), dan moralitas. Sistem ini mendorong distribusi kekayaan yang

merata, peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keadilan, serta pentingnya etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui produksi, konsumsi, distribusi, perdagangan yang sehat, dan pembagian kerja yang efisien (Azizah & Darmawan, 2024). Dalam penelitian ini ekonomi islam perspektif Ibnu Khaldun dijadikan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui analisis pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam perspektif Ekonomi Islam Ibnu Khaldun di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya :

1. Secara Praktis

- a) Bagi penulis: penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendalami hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan IPM dengan pendekatan ekonomi islam perspektif Ibnu Khadlun. Dengan demikian, penulis dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi islam dapat memengaruhi faktor-faktor tersebut secara praktis di tingkat provinsi, seperti Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kredibilitas dan kontribusi penulis dalam bidang ekonomi islam, serta memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut.
- b) Bagi pemerintah: hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi islam untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan IPM di Provinsi Jawa Tengah. Data dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dan merumuskan strategi baru yang lebih efektif.

2. Secara Teoritis

- a) Melalui analisis kasus Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini dapat menjadi bukti empiris tentang validitas konsep ekonomi islam dalam meningkatkan pembangunan manusia. Ini akan menguatkan dasar teoritis ekonomi islam dan membuktikan relevansinya dalam konteks pembangunan.
- b) Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis tentang ekonomi islam dengan menghadirkan analisis empiris yang kuat tentang pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Hal ini akan memperkaya basis pengetahuan dalam bidang ekonomi islam dan memberikan arahan bagi penelitian lebih lanjut.
- c) Temuan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi islam. Ini akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.